

**PENERAPAN PRINSIP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  
DALAM PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH  
DI SMP NEGERI 10 MUARO JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :**

**DINDA AYUNINGSIH YUSUF  
NIM. 07011181823012**

**Konsentrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Ayuningsih Yusuf  
NIM : 07011181823012  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 15 Agustus 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Dinda Ayuningsih Yusuf

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### **Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020**

Skripsi  
Oleh :  
**Dinda Ayuningsih Yusuf**  
07011181823012

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 28 Juli 2022**

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM  
NIP.195811191985031003
2. Dra. Tutty Khairunnisya, MA.  
NIP.196201051988032004

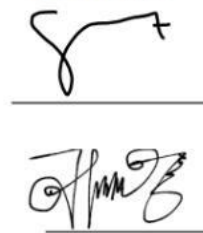
Tanda Tangan



Penguji :

- 1 Drs. Gatot Budiarto, MS.  
NIP.195806091984031002
2. Anang Dwi Santoso, S.A.P., M.A.P  
NIP.199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



**Dr. Nur Budiyanto, S.sos., MPA.**  
NIP. 196911101994011001

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**MOTTO :**

**“jangan membandingkan diri dengan orang lain kamu punya nilai mu sendiri, hiduplah dengan percaya diri”**

**Atas Ridho Allah S.W.T, Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang Tuaku Bapak M. Yusuf dan Ibu Suheni**
- 2. Diriku Sendiri**
- 3. Alm. Abah ku H. . Solihan**
- 4. Keluarga, Saudara, Teman, dan Kerabat dekat**
- 5. Teman-teman seperjuanganku Administrasi Publik 2018**
- 6. Almamater ku**

## ABSTRAK

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan wujud desentralisasi yang mana Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan sekolah otonomi dan kewenangan dalam mengelola sekolah secara mandiri. Manajemen Berbasis sekolah memiliki prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan sekolah. Penerapan prinsip Manajemen Berbasis sekolah dilakukan di seluruh fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan termasuk pengelolaan keuangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Pengelolaan dana BOS dari Soetjipto, dimana berdasarkan teori ini pengelolaan dana BOS dibagi menjadi empat aspek yaitu: 1) kegiatan perencanaan; 2) penggunaan dan pemanfaatan dana BOS; 3) pencatatan atas penggunaan dana BOS; 4) Pelaporan dana pertanggungjawaban dana BOS mengenai. Prinsip MBS berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Prinsip-prinsip tersebut tersebut yaitu 1.) Fleksibilitas; 2) Kemandirian; 3) Kemitraan; 4) Partisipasi; 5) Efektifitas; 6) Efisiensi; 7) Transparansi; dan 8) Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah di dalam empat aspek pengelolaan dana BOS sudah cukup baik, tetapi prinsip partisipasi dalam kegiatan perencanaan belum berjalan dengan baik, sekolah belum melibatkan orang tua dalam kegiatan perencanaan. Dalam penggunaan dana BOS dari hasil perhitungan efisiensi serta dari pelaksanaan anggaran program sekolah tidak efisien. Penerapan prinsip transparansi juga belum dilakukan, serta prinsip akuntabilitas belum terjalin dengan baik.

**Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Penerapan, Prinsip, Pengelolaan, dana BOS, SMP Negeri 10 Muaro Jambi**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Slamet Widodo,MS.,MM**

**NIP. 1958111919855031003**

**Pembimbing II**



**Dra. Tutty Khairunnisya,MA.**

**NIP. 196201051988032004**

**Indralaya, Juli 2022**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 196911101994011001**

## ABSTRACT

School-Based Management is a form of decentralization where School-Based Management is a management model that gives schools autonomy and authority in managing schools independently. School-based Management has principles that must be applied in school management. The application of the principles of school-based management is carried out in all functions that can be decentralized including financial management. This study aims to find out an overview of the application of School-Based Management at SMP Negeri 10 Muaro Jambi. This type of research is a descriptive qualitative research using the theory of BOS fund management from Soetjipto where based on this theory management and BOS are divided into four aspect : 1 ) planning activities; 2) the use and utilization of BOS funds; 3) recording of the use of BOS funds; 4) Reporting of the BOS fund accountability fund regarding. This study discusses the application of School-Based Management in bos fund management. The SBM principle is based on Law Number 19 of 2005 concerning National Standards and Permendikbud Number 8 of 2020 concerning Technical Guidelines for School Operational Assistance. Those principles are 1.) Flexibility; 2) Independence; 3) Partnerships; 4) Participation; 5) Effectiveness; 6) Efficiency; 7) Transparency; and 8) Accountability. The result of this study is that the application of the principles of School-Based Management in the four aspects of BOS fund management is quite good, but the principle of participation in planning activities has not been carried out properly, schools have not involved the elders in the preparation of RKAS. The use of BOS funds from the results of efficiency calculations as well as from the implementation of school program budgets is inefficient. The application of the principle of transparency has also not been carried out, and the principle of accountability has not been well established.

**Keywords: School-Based Management, Application, Principles, Management, BOS funds, SMP Negeri 10 Muaro Jambi.**

*Advisor I*



**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS.,MA**  
**NIP. 1958111919855031003**

*Advisor II*



**Dra. Tuty Khairunnisya, MA.**  
**NIP. 196201051988032004**

**Indralaya, Juli 2022**

*Head of the Department of Public Admonistration*

*Faculty of Social and Political Science*

*Sriwijaya University*



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan Judul “Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020”. Serta tak lupa shalawat dan salam di haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak M. Yusuf dan Ibu Suheni yang tak pernah bosan memberikan semangat, nasihat, dukungan moril dan material, serta tak pernah letih mendengarkan keluh kesah dan selalu mendoakan yang terbaik.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku rektor Universitas Sriwijaya .
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Nur Budiyanto, S.sos, MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Almarhum Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si. sebagai dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Yang Maha Kuasa.
7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP.,SH.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Prof. Dr. H Slamet Widodo, MS, MM. selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan waktu serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dra. Tuty Khairunnisya, MA selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktu dan arahan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Yohannes Ruing, S.pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Muaro Jambi
11. Ibu Dianawati selaku Bendahara SMP Negeri 10 Muaro Jambi.
12. Adikku Rizki Fadillah dan kedua keponakanku Aqila dan Khanza.
13. Sahabat seperjuanganku Natasha Yonalda Zunisha, Hanifah Syafira, Elfira Kurnia Putri yang senantiasa memberikan dukungan moral.
14. Seluruh Teman-Teman Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2018.
15. Seluruh Pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan penelitian ini

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca.

Indralaya, Juli 2022

Dinda AyuningsihYusuf

## DAFTAR ISI

### Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Desentralisasi.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Definisi Keuangan Negara .....</b>	<b>15</b>
<b>3. Definisi Anggaran.....</b>	<b>16</b>
<b>4. Tahap Penganggaran.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Manajemen Berbasis Sekolah .....</b>	<b>19</b>
<b>6. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....</b>	<b>34</b>
<b>6. Teori Yang Digunakan .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Metode Penelitian.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>52</b>
<b>C. Definisi Konsep.....</b>	<b>53</b>
<b>D. Fokus Penelitian .....</b>	<b>55</b>



<b>E. Jenis dan Sumber Data</b> .....	56
<b>F. Informan Penelitian</b> .....	56
<b>G. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	57
<b>H. Teknik Analisis Data</b> .....	58
<b>I. Jadwal Penelitian</b> .....	60
<b>J. Sistematika Penulisan</b> .....	61
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>63</b>
<b>A Gambaran Umum lokasi Penelitian</b> .....	63
1. Sejarah Singkat SMP Negeri 10 Muaro Jambi .....	63
2. Profil Sekolah.....	63
3. Visi dan Misi dan Tujuan SMP Negeri 10 Muaro Jambi .....	64
4. Struktur Organisasi SMP Negeri 10.....	65
5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan .....	71
6. Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 10 Muaro Jambi .....	73
7. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	75
<b>B. Penerapan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah</b> .....	76
1. Kegiatan Perencanaan .....	76
1.1 Prinsip Fleksibilitas .....	77
1.2 Prinsip Kemandirian.....	79
1.3 Prinsip Partisipasi.....	82
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	85
2.1 Prinsip Fleksibilitas .....	85
2.2 Prinsip Kemandirian.....	86
2.3 Prinsip Efektifitas.....	86
1.4 Prinsip Efisiensi .....	90
3. Pencatatan atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	93
3.1 Prinsip Efektivitas .....	93
3.2 Prinsip Efisiensi .....	101
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	102
4.1 Transparansi .....	105
4.2 Prinsip Akuntabilitas .....	107
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020 (Tahap 1 s/d 3)</b> .....	7
<b>Tabel 2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020</b> .....	8
<b>Tabel 3 Kategori Desentralisasi Menurut Tujuan dan Instrumen3 Kategori Desentralisasi Menurut Tujuan dan Instrumen</b> .....	11
<b>Tabel 4 Penelitian Terdahulu</b> .....	43
<b>Tabel 5 Fokus Penelitian</b> .....	55
<b>Tabel 6 Jadwal Penelitian</b> .....	60
<b>Tabel 7 Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMP 10 Muaro Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin</b> .....	71
<b>Tabel 8 Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan SMP Negeri 10 Muaro Jambi Berdasarkan Status Kepegawaian</b> .....	71
<b>Tabel 9Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMP Negeri 10 Muro Jambi Berdasarkan Jenjang Pendidikan</b> .....	72
<b>Tabel 10 Tenaga Pendidik dan Pendidikan SMP 10 Muaro Jambi Berdasarkan Jenis PTK</b> 72	
<b>Tabel 11 Peserta Didik SMP 10 Muaro Jambi Berdesakan Jenis Kelamin</b> .....	73
<b>Tabel 12 Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b> .....	73
<b>Tabel 13 Peserta Didik SMP Negeri 10 Muaro Jambi Berdasarkan Usia</b> .....	74
<b>Tabel 14 Peserta Didik Berdasarkan Agama</b> .....	74
<b>Tabel 15 Sarana dan Prasarana SMP Negeri 10 Muaro Jambi</b> .....	75
<b>Tabel 16 Matriks Penelitian</b> .....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Definisi Desentralisasi.....	12
Gambar 2 Kerangka Pemikiran .....	51
Gambar 3 Struktur Organisasi SMP Negeri 10 Muaro Jambi.....	70
Gambar 4 Fasilitas di SMP Negeri 10 Muaro Jambi .....	89
Gambar 5 Laporan Realisasi Tiap Jenis Anggaran SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020.....	95
Gambar 6 Buku Kas Umum SMP Negeri 10 Muaro Jambi .....	96
Gambar 7 Buku Kas Pembantu SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020.....	98
Gambar 8 Buku Pembantu Pajak SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020 .....	100
Gambar 9 gambar papan informasi SMP Negeri 10 Muaro Jambi .....	104
Gambar 10 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahap I s/d III Tahun 2020.....	108
Gambar 11 Laporan Penggunaan Dana BOS pada Website <a href="http://bos.kemendikbud.go.id">bos.kemendikbud.go.id</a> .....	109



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	122
Lampiran 2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing .....	123
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian .....	125
Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian dari SMP Negeri 10 Muaro Jambi.....	126
Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing I .....	127
Lampiran 6 Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing II.....	129
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Pembimbing I.....	131
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Pembimbing II .....	132
Lampiran 9 Foto Penelitian .....	133
Lampiran 10 Pedoman Wawancara .....	134
Lampiran 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	136
Lampiran 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan .....	139
Lampiran 13 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler .....	141
Lampiran 14 Rencana Kegiatan dan anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 10 Muaro Jambi ..	172
Lampiran 15 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan SMP 10 Muaro Jambi .....	179
Lampiran 16 Laporan Realisasi Penggunaan Tiap Jenis Anggaran SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020 Tahap 1-3 .....	193
Lampiran 17 Buku Kas Umum SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020 Tahap 1-3 .....	209
Lampiran 18 Buku Pembantu Kas .....	220

## DAFTAR SINGKATAN

1. BOS : Bantuan Operasional Sekolah
2. MBS : Manajemen Berbasis Sekolah
3. SDG's : *Sustainable Development Goals*
4. RKAS : Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah
5. Permendikbud : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
6. Depdiknas : Departemen pendidikan Nasional
7. Juknis : Petunjuk Teknis
8. SD : Sekolah Dasar
9. SMP : Sekolah Menengah Pertama
10. SMA : Sekolah Menengah Atas
11. SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
12. COVID -19 : Coronavirus Disease of 19
13. Dapodik : Data Pokok Peserta Didik

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya menerapkan asas desentralisasi, desentralisasi merupakan konsep dalam sistem pemerintahan, dimana pemerintah pusat mendelegasikan wewenang nya kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah untuk menjalankan serta mengurus urusan wilayahnya sendiri. Tujuan penerapan desentralisasi adalah untuk mendorong tingkat efisiensi dan efektifitas fungsi pelayanan publik kepada seluruh tingkatan kelas masyarakat. Asas desentralisasi yang diterapkan di Indonesia diwujudkan dan dikenal dengan bentuk Otonomi Daerah.

Hakikatnya otonomi daerah ialah kewenangan, kewajiban, hak, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengarahkan, mengelola, mengurus serta menjalankan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Otonomi sebagai wujud desentralisasi memberikan keleluasaan dan kebebasan pemerintah daerah dalam mengurus serta menjalankan pemerintahan, kebebasan dan keleluasaan yang diberikan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada seluruh lapisan masyarakat.

Otonomi daerah yang merupakan hasil dari reformasi memberikan dampak perubahan yang luar biasa terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia termasuk di bidang pendidikan. Perubahan yang mendasar pada bidang pendidikan salah satunya perubahan administrasi negara/pemerintahan dari yang awalnya manajemen berbasis pada pusat berubah menjadi manajemen yang berbasis pada daerah. Perubahan manajemen ini secara resmi serta sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, pada tahun 2014 undang-undang tentang pemerintah disempurnakan

lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu Undang-Undang yang memiliki pengaruh terhadap perubahan tatanan pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut berdampak pada manajemen pendidikan yang berubah dari manajemen sekolah yang sentralisasi pada pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. (Hamid, 2007).

Bidang pendidikan merupakan hal penting, hal ini ditunjukkan dengan bidang pendidikan menjadi salah satu target dari 17 target utama *Sustainable Development Goals* atau SDG's. SDG's memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu pembangunan berkelanjutan yang merupakan sebuah program pembangunan global yang dilahirkan dari kesadaran dan kesepakatan bersama 189 negara yang tergabung di dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDG's adalah gerakan lanjutan dari program sebelum yaitu *Millennium Development Goals* (MDG's) yang merupakan gerakan awal sebelum SDG's. Tujuan dari gerakan SDG's ini salah satunya adalah memastikan bahwa terselenggaranya pendidikan yang memiliki kualitas serta menjamin pendidikan terselenggara secara inklusif, merata dan tidak mendiskriminasi serta meningkatkan harapan masyarakat untuk belajar tanpa ada batasan merupakan tujuan utama atau *Goals* yang terdapat pada SDG's nomor empat.

Selaras dengan SDG's pemerintah Indonesia menyadari bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. sistem pendidikan yang baik dan berkualitas dapat membentuk dan meningkatkan masyarakat Indonesia yang berintegritas dan berinteleksi. Pemerintah Indonesia telah lama menyadari bahwa sistem pendidikan yang baik juga mampu membuat sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing serta pendidikan yang baik mampu mengantarkan Indonesia memenuhi tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.



Tujuan dari pendidikan sendiri sudah tercantum dalam Tap MPR No II Tahun 1960 (1960) yang mengemukakan bahwa tujuan dari pendidikan ialah mencetak generasi ke arah mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai dengan pancasila sehingga dapat bertanggungjawab sebagai masyarakat yang adil serta memiliki daya spiritual yang tinggi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luar biasa bagi pengelolaan pendidikan, yaitu perubahan orientasi pengelolaan pendidikan yang pada mulanya sentralisasi atau terpusat menjadi pengelolaan yang desentralisasi.

Perwujudan desentralisasi dalam manajemen dan pelaksanaan bidang pendidikan dalam hal ini termasuk di dalamnya pengelolaan di tingkat sekolah. Alternatif perwujudan desentralisasi dalam pengelolaan di tingkat sekolah adalah pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (*School base management*)

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu realisasi dari reformasi di bidang pendidikan. Secara harfiah, manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata: manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen berbasis sekolah diterjemahkan langsung dari *School-Base Management*. Pada tahun 1970 kata ini muncul di Amerika sebagai opsi dari perubahan dari manajemen pendidikan atau manajemen sekolah.

Wohlstetter dan Mohrman (Nurkholis, 2003) mengenai definisi dari MBS memberikan pendapatnya. Bahwa secara luas Manajemen Berbasis Sekolah memiliki arti pendekatan politik guna menyusun ulang organisasi sekolah dengan memberikan otoritas dan keleluasaan sekolah kepada orang yang ikut berpartisipasi dalam ruang lingkup lokal untuk mendorong sekolah untuk lebih maju. Orang tersebut ialah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat di sekitar dan siswa.

Manajemen Berbasis Sekolah jika dilihat dari sudut pandang yang lebih kecil mengacu hanya pada perubahan di bidang tertentu saja. dikemukakan oleh Kubick (Nurkholis, 2003). MBS mengalihkan tanggung jawab pengambilan keputusan dari pemerintah daerah ke sekolah terkait anggaran, kepegawaian, dan kurikulum. MBS memberikan hak kepada kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua untuk mengelola proses pendidikan.

Manajemen Berbasis sekolah memiliki definisi sebagai realisasi desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan di tingkat sekolah yang meliputi tiga bidang yaitu, anggaran tenaga pendidik dan kependidikan, serta bidang kurikulum. Dalam Model manajemen MBS kewenangan dan otoritas pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah daerah. Selanjut dari pemerintah daerah diturunkan ke pengawas dari pengawas turun ke kepala sekolah dan seterusnya sampai orang tua siswa.

Departemen Pendidikan Nasional (2002) mendefinisikan Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen pendidikan, dimana otonomi lebih besar kepada sekolah memberikan keluwesan kepada sekolah, sehingga mendorong *stakeholder* berpartisipasi secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada intinya, MBS merupakan bentuk model dari manajemen pendidikan yang memberikan hak, kewenangan, dan otoritas terhadap sekolah dalam mengelola hal-hal yang dimiliki sekolah secara participative, mandiri serta akuntabel sehingga mampu meningkatkan mutu dan kualitas sekolah.

Munculnya manajemen berbasis sekolah ialah pengaruh dari lahirnya desentralisasi, pengelolaan pendidikan sebagaimana diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 serta terbitnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Manajemen Berbasis sekolah adalah program nasional yang tercantum dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 1 mengatakan “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah”. Manajemen berbasis sekolah juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 ayat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun (2005) mengatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan MBS yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

Menurut Depdiknas (Nurkholis, 2006) fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan dalam Manajemen Berbasis Sekolah adalah:

1. Perencanaan dan evaluasi program
2. Pengelolaan kurikulum
3. Pengelolaan proses belajar mengajar
4. Pengelolaan ketenagaan
5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan sekolah
6. Pengelolaan keuangan
7. Pelayanan siswa
8. Hubungan sekolah dan masyarakat
9. Pengelolaan iklim sekolah

Dalam pengelolaan sekolah salah satu aspek penting adalah aspek keuangan yaitu biaya pendidikan. Aspek biaya merupakan aspek utama sekolah yang digunakan dalam membiayai semua pembiayaan pendidikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan anggaran pendidikan diantaranya adalah bagaimana cara untuk mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan satuan pendidikan dan bagaimana mengakomodir masyarakat yang berada di keadaan tidak mampu dalam mendapat haknya di bidang pendidikan dengan baik dan layak. Untuk membenahi dan mengatasi permasalahan yang timbul Kementerian Pendidikan mengambil kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah yang sudah terdaftar pada Dapodik.

Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi aksi pemerintah dalam mendorong terciptanya iklim pendidikan yang mempunyai mutu dan merealisasikan sistem pendidikan yang merata serta mampu didapat semua orang. Dana BOS menunjang program yang mewajibkan masyarakat belajar selama 12 yang digalakkan oleh pemerintah. Dana BOS juga memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu, sehingga masyarakat tidak mampu dapat menjangkau pendidikan wajib. Hal ini merupakan usaha pemerintah memenuhi target *Sustainable Development Goal's* nomor empat yaitu menciptakan sistem pendidikan yang dapat didapatkan seluruh rakyat serta menaikkan angka kesempatan belajar masyarakat.

Untuk membantu biaya pendidikan, Dana Bantuan Operasional sekolah diberikan bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyono (2010) BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan dan

BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Pemberian Dana Bantuan Sekolah (BOS) kepada sekolah pertama kali diterapkan pada Juli 2005 dengan menentukan target dari seluruh murid sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) dan satuan pendidikan lain yang sederajat. Dana BOS Menengah juga diberikan dan disalurkan oleh pemerintah kepada seluruh satuan pendidikan menengah di Indonesia (SMA dan SMK) baik negeri maupun swasta.

Pemberian Dana Bantuan Sekolah yang diberikan pada satuan pendidikan menengah pertama (SMP) disebut BOS SMP. Program Dana BOS SMP adalah program pemberian dana langsung ke SMP. Besaran dana BOS setiap sekolah SMP tidak sama dihitung dari total siswa yang terdaftar di SMP tersebut. Dana BOS dihitung dari jumlah masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (*unit cost*) BOS SMP. Satuan Biaya program BOS SMP berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS SMP Tahun 2020 pasal 6 besaran satuan biaya Dana BOS SMP sebesar Rp 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik SMP setiap 1 (satu) tahun.

Program Dana BOS SMP dilaksanakan harus mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) BOS SMP, dimana pengelolaannya mengutamakan konsep MBS . masyarakat. Sekolah memiliki tugas untuk secara mandiri meneliti, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola pada pemerintah dan masyarakat.

SMP Negeri 10 Muaro Jambi merupakan satuan pendidikan negeri yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2020 SMP Negeri 10 Muaro Jambi

menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan total penyaluran sebesar Rp 341.880.000 yang disalurkan dalam tiga tahap sebagai berikut:

**Tabel 1 Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020 (Tahap 1 s/d 3)**

Tahap I ( Januari-April 2020)	Rp 101.970.000
Tahap II ( Mei-Agustus 2020)	Rp 135.900.000
Tahap III ( September- Desember 2020)	Rp 104.010.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 341.880.000</b>

*Sumber: diolah Penulis berdasarkan Laporan SPJ Dana Operasional Sekolah SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020*

Menurut dari tabel1 dana BOS yang diterima SMP Negeri 10 Muaro Jambi pada tahap pertama berjumlah Rp 101.970.000, pada tahap kedua diterima sebesar Rp 135.900.000, dan pada tahap ketiga berjumlah sebesar Rp 104.010.000

Pada penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah sering terjadi keterlambatan penyaluran oleh pemerintah pusat. Dana Bantuan Operasional sekolah SMP Negeri 10 Muaro Jambi tahun 2020 tahap I seharusnya disalurkan pada awal bulan Januari 2020, namun pada tahap satu ini Dana BOS diterima pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Pada tahap ke II penyaluran Dana BOS SMP Negeri 10 Muaro Jambi diterima pada tanggal 16 Juni 2020 yang seharusnya pada awal Mei sudah harus diterima. Keterlambatan juga terjadi pada tahap ke III penyaluran Dana BOS yang seharusnya penyaluran diterima pada bulan September, tetapi penyaluran Dana BOS diterima oleh sekolah pada tanggal 16 November 2020.

Selain itu, dalam pelaksanaan dana BOS tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 terdapat perubahan alokasi dana pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2020. Terdapat perubahan pada rencana kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler,

dimana dana kegiatan tersebut dialihkan untuk dana pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

**Tabel 2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020**

<b>Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</b>	
<b>Belanja Pegawai</b>	
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Honor Pelatih Pramuka	Rp 6.000.000
Honor Pendamping O2SN dan FLS2N	Rp 1.500.000
Transport Pembina / Pendamping/Pelatih O2sn,Fls2n, LCC dan Olimpiade	Rp 2.500.000
Transport Pembina Pramuka, PMR, Seni Tradisional	Rp 3.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.000.000</b>

Sumber : *diolah penulis berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebelum perubahan tahun 2020*

Tabel 2 merupakan rencana kegiatan dan anggaran kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebelum perubahan, dimana pada RKAS alokasi dana BOS pada kegiatan tersebut pada dana belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 13.000.000 namun, pada pelaksanaannya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk belanja pegawai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dialihkan.

Pemerintah melalui program Dana BOS memberikan dana bantuan kepada satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang menerima Dana BOS wajibkan untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan. Sekolah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dengan mandiri pengelolaan sekolah termasuk di dalamnya pengelolaan dana. Oleh karena itu, Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sangat penting dalam pengelolaan sekolah. Tidak hanya untuk menjamin tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, MBS juga memastikan bahwa kewenangan sekolah juga ter jalan dengan baik sehingga mendukung

efisiensi sekolah yang lebih mandiri dan profesional, mengembangkan dan menetapkan strategi pelaksanaan program sekolah, dan memungkinkan arah pengembangan pendidikan sekolah sesuai dengan tuntutan masyarakat akan kualitas layanan pembelajaran. sekolah. Pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan di latar belakang ini membuat penulis memutuskan untuk meneliti mengenai **“Penerapan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui Penerapan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya di bidang keuangan negara dan dapat menjadi acuan kepustakaan mengenai penerapan prinsip manajemen berbasis sekolah terkhusus dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)

### **2. Manfaat Praktis**



Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat serta memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait dan pihak yang berkepentingan dalam hal ini SMP Negeri 10 Muaro Jambi mengenai penerapan prinsip manajemen berbasis sekolah dan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SMP Negeri 10 Muaro Jambi sehingga baik dan optimal

## DAFTAR PUSTAKA

- admin SMP. (2021). *5 Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah*. Kemendikbud.Go.Id. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/5-prinsip-dalam-penerapan-manajemen-berbasis-sekolah/>
- Aedi, N. (2008). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta:Dirjen Peningkatan Mutu dan Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan.
- Andiawati, E. (2016). Pengelolaan Keuangan Lembaga Sekolah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surakarta*, 1(1).
- Aprilia, S. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di SD 142 Kota Palembang. *Skripsi Universitas Sriwijaya*.
- Astuti, P. (2021). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah Pada Pengelolaan Dana BOS (Studi Pada SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang). *Skripsi STIE PGRI Dewantara*.
- Damanik, P. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakem Tahun Ajaran 2017/2018. *Skripsi Universitas Sanata Dharma*.
- Danim, S. (2015). *Visi Baru Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Fattah, N. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung:Pustaka Bani Quraisy.
- Halluti, A. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai. *Journal of Teaching and Learning Research*, 1.
- Hamid, M. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Pertama.
- Harahap, T. H. (2018). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Dana BOS di SMP Swasta Se Kecamatan Patambuk. *Tesis Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*.
- Hayati, E. D. (2012). Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mragen Demak 2012. *Educational Management*, 1(2).
- Hidayat, A., & Machali, I. (2016). *The Handbook of Educational Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta:Prenadamedia.
- Kemendikbud. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pentunjuk Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.
- Kemendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1996 Tentang Kriteria Keuangan*. (1996).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja*. (1996).
- Kompri. (2014). *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Bandung:Alfabeta.

- Lawotan, Y. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di SD Katolik 143 Bhakyarsa Maumere. *Jurnal Pendidikan*, 3.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- MPR RI. (1960). *TAP MPR/Nomor/II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Tahap Pertama 1961-1969*.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah: konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Murni. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Mimbar Akademia*, 3(2).
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Noviyanti, R. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPK Bukit Raya Serawai Kabupaten Kalimantan Barat. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*.
- Nurkholis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Nurkholis. (2006). *Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia, Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan. *Jurnal Edu Tech*, 3.
- Patton. (1980). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pendidikan, D. (2002). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Konsep Dasar*. Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjend SLTP.
- Pusvitasari, R., & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Siduarjo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al- Tandzim*, 4(1).
- Rahman, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- RKAS Perubahan SMP 10 Muaro Jambi Tahun 2020. (2020).
- SMP 10 Muaro Jambi. (2020a). *Laporan SPJ Dana BOS SMP 10 Muaro Jambi Tahun 2020*.

- SMP 10 MuaroJambi. (2020b). *RKAS SMP 10 Muaro Jambi Tahun 2020*.
- Sobahi, K., Hanafia, & Suhana. (2010). *Manajemen Pendidikan (melalui manajemen strategic, manejemen sekolah, balence scorecard,Blue Ocean Strategy, Learning Organisation, MBS,MMT)*. Bandung:CV. Cakra.
- Subkhi Widyatmoko, & Suyatmini. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Kemasari 1 Surakarta 2017. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(2).
- Sugiyono. (2004). *Statistik Untuk Penelitian*. Jakarta:Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Jakarta:Alfabeta.
- Sulaiman. (2011). *Keuangan Negara Pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung:PT. Alumni.
- Supriono, S., & Sapari, A. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya:Penerbit SIC.
- Supriyono, R. A. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Bandung:BPFE.
- Susilawaty, Zahri, C., & Harun Khairuddin. (2012). Manajemen berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SDN 4 Kota Banda Aceh 2012. *Jurnal Administrasi Pendidikan PascaSarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(2).
- Tjandra, R. W. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta:Grasindo.
- Triwiyanto, T. (2015). *Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah*. MBS Center. [https://mbscenter.or.id/site/page/id/372/page\\_action/viewdetail/title/Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah](https://mbscenter.or.id/site/page/id/372/page_action/viewdetail/title/Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (2004).
- Undang-Undang RI. (2003a). *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang RI. (2003b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang RI. (2005). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Widyastuti, A. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Perencanaan*. Medan:Yayasan Kita Menulis.
- Winayanti, N. K. (2015). *Hand-Out Pengertian Keuangan Negara*. Bandung:FH Unpas.
- Yahya Mulyadi, Hermawan, I. C., & Sulaeman., T. (2021). Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Politik,Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.
- Zaenuddi, M. (2018). *Isu,Problematika,dan Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik: Kumpulan Esay dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta:Deepublish.